

PENGARUH KEBIJAKAN EKONOMI MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Farida Syah Damanik¹, Gladis Jelita², Uzlah Hansel Bahrin Hasibuan³, Maryam Batubara⁴
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

e-mail: faridasyah4@gmail.com¹, gladisjamilah1107@gmail.com², hanselhasibuan@gmail.com³,
maryam.batubara@uinsu.ac⁴

Abstrak – Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting kemajuan suatu negara. Di Indonesia, berbagai inisiatif dilakukan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Alat politik yang sering digunakan adalah kebijakan moneter dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan moneter dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari sumber perpustakaan dan dokumen kebijakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengungkap hubungan antara kebijakan keuangan dan ekonomi yang diterapkan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya kebijakan keuangan dan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan ekonomi moneter, Pertumbuhan ekonomi.

Abstract – Economic growth is one of the important indicators of a country's progress. In Indonesia, various initiatives are carried out with the aim of achieving stable and sustainable economic growth. Political tools that are often used are monetary and economic policies. The purpose of this study is to use qualitative literature research methods to analyze the impact of monetary and economic policies on economic growth in Indonesia. The data of this research was obtained from library sources and economic policy and economic growth documents in Indonesia. Through qualitative analysis, this study reveals the relationship between financial and economic policies implemented and their impact on Indonesia's economic growth. The results of this study are expected to provide deeper insights into the importance of financial and economic policies in encouraging economic growth in Indonesia.

Keywords: Monetary economic policy, Economic growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting kemajuan suatu negara. Di Indonesia, berbagai inisiatif dilakukan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Alat politik yang sering digunakan adalah kebijakan moneter dan ekonomi. Kebijakan ini diterapkan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, dengan tujuan menjaga stabilitas mata uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan merupakan salah satu prasyarat utama kelangsungan perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan dan percepatan pembangunan perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi lapangan kerja. Kualitas kerja juga mempengaruhi rendahnya produktivitas, pekerjaan di dunia proses produksi, dan tingkat partisipasi sosial pekerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang dihasilkan, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Inflasi yang normal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun inflasi yang melebihi batas atas mempunyai dampak negatif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengadopsi dua kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengelola keuangan pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional, termasuk produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan stabilitas harga. Artinya, keuangan publik penting tidak hanya untuk membiayai fungsi pemerintahan sehari-hari, namun juga sebagai “instrumen” untuk mencapai tujuan pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan distribusi pendapatan.

Penggunaan fluktuasi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar oleh pemerintah atau otoritas moneter untuk mempengaruhi permintaan agregat dan mengurangi volatilitas ekonomi dikenal sebagai kebijakan moneter. Jumlah uang beredar harus terus meningkat daripada dikendalikan dan disesuaikan oleh otoritas moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pemerintah juga menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal guna mencapai tujuan makroekonomi. Stabilitas perekonomian dapat diukur dari kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Apabila stabilitas kegiatan perekonomian terganggu, kebijakan moneter dapat memulihkan stabilitas tersebut (tindakan stabilisasi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk mengkaji pengaruh kebijakan ekonomi moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan resmi, dan dokumen kebijakan.

Pendekatan kualitatif dengan library research ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan antara kebijakan ekonomi moneter dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab-Penyebab Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, seperti Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam suatu negara. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk menjaga stabilitas harga (inflasi), stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter negara, memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneternya. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti Menjaga nilai tukar Rupiah, Menjaga jumlah uang beredar dan Menjaga tingkat inflasi. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kebijakan moneter, termasuk menetapkan target moneter seperti

jumlah uang beredar dan suku bunga. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai dan mempertahankan target tingkat inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan berbagai instrumennya, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Salim 2017, 70).

Variabel moneter yang dapat digunakan untuk mencapai stabilitas makroekonomi antara lain inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Dengan stabilitas makroekonomi yang baik maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat, namun barang dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan kapasitas produksi, dan peningkatan anggaran produksi menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi (Rahmawati, Astuti, and Ayuningtyas 2023, 15).

Kebijakan moneter merupakan langkah strategis yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam suatu negara. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan dengan cara mengelola peredaran uang dan suku bunga, yang pada akhirnya akan memengaruhi berbagai variabel ekonomi penting yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Proses kebijakan moneter dapat diumpamakan sebagai sebuah respons ekonomi terhadap perubahan yang dilakukan. Dimulai dengan perubahan pada instrument kebijakan, seperti suku bunga atau jumlah uang beredar, dan diakhiri dengan penyesuaian menyeluruh perekonomian terhadap kebijakan tersebut (Budiyanto and Wibowo 2021, 989).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif adalah dua kategori kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang berupaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian, khususnya dengan meningkatkan jumlah uang beredar, dikenal sebagai kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter kontraktif, di sisi lain, adalah kebijakan moneter yang bertujuan memperlambat aktivitas perekonomian, terutama dengan mengurangi jumlah uang beredar (Simanjuntak, Pardosi, and Nababan 2023, 226).

Aktivitas perekonomian dan keuangan suatu negara dipengaruhi oleh peran kebijakan moneter bank sentral. Sebab, kebijakan ini bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk stabilitas harga dan peredaran uang dalam perekonomian. Perubahan aliran uang, suku bunga, nilai mata uang, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 berlaku di Indonesia. Tercapai dan terpeliharanya nilai Rupiah, stabilitas harga (inflasi), dan stabilitas nilai tukar merupakan tujuan Bank Indonesia (BI).

Secara praktis, kebijakan moneter dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. Pergeseran tindakan bank, bank sentral, dan pelaku ekonomi lainnya;
2. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan inflasi
3. Modifikasi pengiriman uang sesuai dengan perkembangan keuangan dan perekonomian bangsa.

Oleh karena itu, penting untuk memperkirakan perubahan perilaku agar dapat bereaksi terhadap perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan industri keuangan. Kerumitan instrumen keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan keuangan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setidaknya ada dua langkah untuk menjelaskan rumitnya sistem transmisi kebijakan moneter Indonesia.

Pertama, pertukaran yang terjadi di pasar keuangan, khususnya yang terjadi antara bank dan lembaga keuangan lain serta bank sentral. Kedua, adanya interaksi yang terkait dengan peran intermediasi. Interaksi ini melibatkan pertukaran antara berbagai pelaku

ekonomi di sektor riil dan lembaga keuangan seperti bank. Uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, nilai aset, dan ekspektasi adalah saluran yang mendorong kebijakan moneter. (Rahmad Riho Zeen et al. 2022, 262–63).

Variabel-variabel yang dapat menyebabkan krisis mata uang tercantum di bawah ini.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kajian Frederick S, Miskin dalam bukunya *Monetary Policy* menyatakan bahwa defisit anggaran rata-rata sebesar 1% terhadap PDB. Artinya, defisit anggaran rata-rata sebesar 1% pada saat inflasi. Ketika inflasi naik, PDB bergerak lebih lambat, namun begitu inflasi stabil, pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cepat, hingga 8%.

2. Nilai Tukar

Nilai Tukar Eifinger dan Karatas (2012) menyatakan bahwa kebijakan moneter menyebabkan tambahan depresiasi 0,06 poin persentase pada nilai tukar untuk subsampel ini.

3. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang yang beredar juga berdampak pada kemungkinan terjadinya krisis. Penelitian Hartomo (2010) yang menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) untuk uji normalitas (uji J-B) menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berdampak negatif terhadap tingkat inflasi.

4. Inflasi

Hubungan positif dengan inflasi Kebijakan moneter diperkenalkan di Brazil pada tanggal 21 Juni 1999 dan diumumkan oleh Presiden Brazil pada tahun yang sama sebagai respon terhadap depresiasi nilai tukar. Dengan stabilnya nilai tukar, inflasi turun dari 2.500% pada bulan Desember 1993 menjadi kurang dari 2% pada bulan Desember 1998.

5. Suku Bunga

Suku Bunga Menurut Ridwan (2013), bahkan ketika perekonomian global sedang melambat, perekonomian tumbuh lebih baik ketika suku bunga turun.

6. Indeks Saham

Berdasarkan perhitungan penelitian Indeks Saham Gabungan Ridwan (2013) diketahui terdapat korelasi sebesar 0,685 antara variabel PDB dengan IHSG. Koefisien korelasi sebesar 0,685 menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel PDB dengan IHSG. Hubungan variabel PDB dengan IHSG hanya bersifat satu arah. Dengan kata lain, nilai IHSG naik seiring dengan kenaikan nilai PDB dan sebaliknya..

7. Neraca Pembayaran

Curtis et al (2015) menyatakan bahwa Meksiko mengalami krisis peso pada awal tahun 1990an. Untuk mempelajari krisis peso mereka mendemonstrasikan bagaimana fluktuasi nilai tukar terjadi dan memanfaatkan model neraca pembayaran sebagai acuan krisis peso Meksiko. Cadangan digunakan oleh bank sentral untuk mendanai aliran modal swasta. Neraca pembayaran menjadi positif seiring dengan peningkatan PDB, dan sebaliknya.

8. Debt Service Ratio (DSR)

Drehmann et al. (2012) melakukan penelitian di lima negara: Inggris, Italia, Korea Selatan, Australia, Finlandia, dan Amerika Serikat, dan menemukan bahwa DSR merupakan indikator yang akurat. Peneliti menemukan bahwa ini adalah indikator awal krisis sistem perbankan. Studi ini menyimpulkan bahwa DSR lebih berguna dan dapat berperan sebagai berikut: Indikator untuk mengidentifikasi kerentanan pada sektor ekonomi riil dan sektor keuangan (Sari and Fakhrudin 2016, 380–81).

Dalam perspektif Islam, terjadinya krisis ekonomi tentu saja erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti monopoli, korupsi, riba (dalam arti luas), dan perbuatan salah lainnya. Tidaklah berlebihan jika kita berargumentasi bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini adalah akibat dari tindakan manusia jika para pelaku ekonomi terbiasa beroperasi secara mandiri. (Umi et al. 2022, 102). sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Rum ayat :41

يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتِ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

B. Cara Menanggulangi Penyebab Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan moneter kategori kedua secara aktif mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk memperluas pendanaan, bank nasional dapat meminta bank umum meningkatkan rasio pembayaran dividen (keuntungan) kepada investor. Hal ini akan menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan pengelolaan kas bank. Bank Sentral (Bank Negara) dapat mengontrol jumlah kredit dan jumlah uang beredar dengan cara Menurunkan GWM (Gearing Minimum Requirement), Menurunkan rasio pinjaman terhadap simpanan, Menurunkan rasio permintaan simpanan dan Menurunkan laba atas modal yang diinvestasikan (Putri and Nasution 2022, 179).

Suku bunga pinjaman dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditekankan oleh teori Schumpeter. Menurut Schumpeter, wirausaha memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, di negara yang maju, peluang inovasi semakin terbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan akhirnya mencapai kondisi stabil. Schumpeter memulai analisisnya dengan asumsi ekonomi yang stagnan, tetapi dia percaya bahwa ini hanya keadaan sementara.

Sebuah penelitian oleh Lee & Werner (2022) menunjukkan bahwa di hampir semua negara yang diteliti, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan suku bunga adalah positif, bukan negatif. Hal ini berarti bahwa ketika suku bunga meningkat, pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat. Meskipun tidak dapat disimpulkan secara pasti bahwa suku bunga menyebabkan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya kemungkinan besar saling terkait.

Temuan ini berlaku untuk negara maju dan berkembang. Artinya, kebijakan moneter yang hanya fokus pada penurunan atau kenaikan suku bunga mungkin tidak cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Hal ini berlaku tidak hanya dalam situasi pasca krisis, di mana suku bunga rendah mungkin umum terjadi. (Yusri, Chairina, and Rifdah Riyan Dara 2023, 88–89).

Dampak jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang dengan menggunakan perhitungan VECM diketahui jumlah uang beredar yang beredar adalah (M2). Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Putra and Soebagiyo 2023, 813).

Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, otoritas moneter perlu menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga. Hal ini karena kenaikan suku bunga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk menjaga agar jumlah uang beredar tetap terkendali agar tidak berakibat negatif terhadap ekonomi. (Aristina, Juliprijanto, and Prasetyanto 2018, 411–12).

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah dapat menerapkan berbagai bentuk kebijakan dalam menanggulangi masalah ekonomi moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan yang umum digunakan:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif: Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dan merangsang aktivitas ekonomi. Beberapa instrumen yang dapat digunakan adalah:
 - Penurunan Suku Bunga: Bank sentral dapat menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pinjaman dan investasi. Suku bunga yang lebih rendah akan mendorong konsumsi dan investasi, yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
 - Operasi Pasar Terbuka: Bank sentral dapat melakukan pembelian obligasi pemerintah atau instrumen keuangan lainnya dari pasar terbuka. Tindakan ini akan meningkatkan likuiditas di pasar dan mendorong aktivitas ekonomi.
 - Penyesuaian Persyaratan Cadangan Bank: Bank sentral dapat menurunkan persyaratan cadangan yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial. Langkah ini akan meningkatkan likuiditas bank-bank dan mendorong penyaluran kredit kepada sektor riil (Fahdian et al. 2018, 15–14).
2. Kebijakan Fiskal Ekspansif: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak. Beberapa bentuk kebijakan fiskal yang dapat digunakan adalah:
 - Pengeluaran Publik: Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Peningkatan pengeluaran publik akan merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - Stimulus Fiskal: Pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal berupa insentif atau bantuan kepada sektor-sektor tertentu yang mengalami kesulitan. Langkah ini akan membantu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut.
 - Pemotongan Pajak: Pemerintah dapat mengurangi beban pajak bagi individu dan perusahaan. Pemotongan pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi sektor swasta.
3. Kebijakan Struktural: Pemerintah dapat menerapkan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi jangka panjang. Beberapa kebijakan struktural yang dapat diterapkan adalah:
 - Deregulasi: Pemerintah dapat mengurangi hambatan dan regulasi yang membatasi aktivitas bisnis. Deregulasi akan mendorong investasi dan inovasi.
 - Privatisasi: Pemerintah dapat mengurangi kepemilikan dan pengelolaan langsung terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu dengan cara menjual atau mengalihkan kepada sektor swasta. Privatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor tersebut.
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan daya saing ekonomi.
4. Kebijakan Promosi Investasi dan Ekspor: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk mendorong investasi dan ekspor. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:
 - Insentif Investasi: Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak atau keringanan bea masuk, kepada investor yang melakukan investasi dalam sektor-sektor strategis.

- Peningkatan Akses ke Pembiayaan: Pemerintah dapat menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau ke pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
 - Pengembangan Pasar Ekspor: Pemerintah dapat meningkatkan promosi dan fasilitasi perdagangan internasional untuk meningkatkan ekspor. Hal ini meliputi peningkatan akses pasar, fasilitasi perizinan, dan dukungan dalam pemasaran produk ekspor.
5. Kebijakan Stabilitas Keuangan: Pemerintah perlu menjaga stabilitas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan adalah:
- Pengawasan Perbankan: Pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalkan risiko keuangan.
 - Regulasi Pasar Keuangan: Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang ketat terhadap pasar keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan yang berpotensi merugikan ekonomi.
 - Manajemen Risiko Sistemik: Pemerintah dapat mengembangkan mekanisme dan lembaga yang bertugas mengelola risiko sistemik dalam sektor keuangan, seperti lembaga penjaminan simpanan dan lembaga penanganan krisis keuangan.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan-kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang dalam merancang kebijakan ekonomi (Nazhicul Amin et al. 2023, 1920).

D. Cara Menanggulangi Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Islam, tujuan utama ekonomi moneter lebih fokus kepada sumber daya ekonomi agar tetap beredar dengan memastikan adanya badan usaha ekonomi dan instrumen keuangan syariah yang dapat menyerap potensi dari investasi masyarakat.

Kebijakan moneter Islam harus bebas dari riba dikarenakan Islam melarang adanya dalam aktivitas ekonomi. Pengelolaan uang dalam Islam berdasarkan pada bagi hasil. Pada zaman Nabi praktik moneter dengan menggunakan standar dirham dan dinar. Dinar dan dirham sebagai alat tukar dan alat pembayaran dengan perbandingan dinar dan dirham 1:10. Islam tidak mengenal adanya inflasi mengingat dinar dan dirham memiliki nilai yang stabil (Irawan et al. 2023, 6–7). Dalam menjaga stabilitas nilai uang maka kerangka kebijakan moneter dalam Islam adalah stok uang, dengan menjamin pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksplorasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa untuk kesejahteraan sosial. Uang adalah public good tidak dibolehkan untuk ditimbun karena dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Ketika terjadi penimpunan kekayaan maka akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Yudi Setiawan and Karsinah 2018, 462). Penimbunan kekayaan sangat berimbas pada keberlangsungan perekonomian sebagaimana tertuang pada QS. at Taubah 34, yaitu:

اللَّهُ بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ الْبَاطِلَ الَّذِي هُمْ يَكْتُمُونَ ۗ إِنَّ أَعْيُنَ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ بَصِيرَةٌ ۚ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ عَنِ عِبَادَتِهِ قُلُوبُهُمْ ۗ إِنَّا لَوَاقِعُونَ ۚ
 أَلَيْسَ بِعَذَابٍ مُّبِينٍ ۗ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ عَنِ عِبَادَتِهِ قُلُوبُهُمْ ۗ إِنَّا لَوَاقِعُونَ ۚ

Artinya; “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Untuk mewujudkan sasaran kebijakan moneter Islam harus dapat mengubah masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam dan melakukan reformasi perekonomian dengan peran serta dari pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus sejalan seirama. Sehingga praktik- praktik monopolistik dapat dihilangkan dan melakukan upaya penggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan barang dan jasa(Maharani 2023, 366–67).

E. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Ekonomi Syariah

Beberapa kebijakan yang lebih spesifik yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara ekonomi syariah:

1. **Regulasi dan Pengawasan:** Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk sektor keuangan syariah. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti operasional bank syariah, pengelolaan risiko, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemerintah juga harus melibatkan otoritas pengawas yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.
2. **Insentif dan Subsidi:** Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, pemerintah dapat memberikan insentif dan subsidi kepada pelaku bisnis yang beroperasi dalam sektor ekonomi syariah. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau pembebasan pajak untuk bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Subsidi juga dapat diberikan kepada sektor-sektor yang dianggap strategis, seperti sektor pertanian syariah atau industri halal, untuk mendorong pertumbuhan dan investasi.
3. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pemerintah perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk tenaga kerja dalam sektor ekonomi syariah. Ini meliputi peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, keterampilan keuangan syariah, manajemen risiko, dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah. Pendidikan dan pelatihan yang baik akan membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan sektor ekonomi syariah yang berkembang.
4. **Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan Syariah:** Pemerintah dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan pasar. Ini dapat melibatkan dukungan dalam hal penelitian dan pengembangan, pemberian lisensi untuk produk-produk baru, dan pemfasilitas akses ke pasar bagi lembaga keuangan syariah. Pemerintah juga dapat mempromosikan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional untuk memperluas jangkauan produk dan layanan keuangan syariah.
5. **Promosi Ekonomi Syariah di Tingkat Internasional:** Pemerintah dapat aktif mempromosikan ekonomi syariah di tingkat internasional untuk menarik investasi dan memperluas pasar ekspor. Ini melibatkan partisipasi dalam pameran dan konferensi internasional terkait ekonomi syariah, promosi pariwisata halal, dan pembentukan kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki minat serupa. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam perekonomian global(Sukarna et al. 2024, 4147–48).

Semua kebijakan ini harus diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan syariah, pelaku bisnis, ulama, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, ekonomi syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melibatkan berbagai strategi seperti insentif investasi, peningkatan akses ke pembiayaan, pengembangan pasar ekspor, pengawasan perbankan, regulasi pasar keuangan, manajemen risiko sistemik, regulasi sektor keuangan syariah, insentif untuk sektor ekonomi syariah, pendidikan tenaga kerja dalam sektor ekonomi syariah, pengembangan produk dan layanan keuangan syariah, serta promosi ekonomi syariah di tingkat internasional. Penting untuk implementasi konsisten dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Variabel yang dapat menyebabkan krisis mata uang di Indonesia antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, indeks saham, neraca pembayaran, dan rasio pembayaran hutang. Kebijakan moneter yang ekspansif, fiskal yang ekspansif, dan kebijakan struktural diperlukan untuk mengatasi penyebab finansial dari pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan keuangan pertumbuhan ekonomi juga mencakup kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif, dan kebijakan struktural.

Peneliti telah banyak mengkaji pengaruh kebijakan moneter, termasuk syariah, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki efek yang besar dan cara kerjanya mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan moneter dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dampak kebijakan keuangan dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga.

Kesimpulannya, kebijakan pemerintah dan bank sentral Indonesia untuk mengatasi masalah keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi mencakup berbagai strategi dan langkah, seperti kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif, dan kebijakan struktural. Penelitian masih terus dilakukan untuk memahami dampak kebijakan moneter, termasuk syariah, terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi et al. 2023. "Analisis Dampak Kebijakan Moneter Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2(2): 50–58. doi:10.56127/jekma.v2i2.713.
- Aristina, Khusni, Whinarko Juliprijanto, and Panji Kusuma Prasetyanto. 2018. "Analisis Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005-2018." *Jurnal Ekonomi* 1(1): 403–14. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/download/1372/676>.
- Budiyanto, Very, and Wisnu Wibowo. 2021. "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia) ." *Jurnal ilmiah manajemen dan akuntansi* 5(1): 988–98. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/876>.
- Fahdian, Maulidah et al. 2018. "ANALISIS MONETER PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PASCA KRISIS KEUANGAN ASIA." *SENAJA Prosiding Seminar Nasional Manajemen Jayanegara*: 11–15.
- Irawan et al. 2023. "Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."

2(3).

- Maharani, Dewi. 2023. "Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Keislaman* 6(2): 360–68. doi:10.54298/jk.v6i2.3915.
- Nazhicul Amin, Awibi, Eva Ana Rianti, Pramodya Hanggarany, and Safa'atul Yunilasari. 2023. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter (Periode 1978-2018)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2(11): 916–21. doi:10.59188/jcs.v2i11.554.
- Putra, D C, and D Soebagiyo. 2023. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Moneter Di Indonesia Periode 2006-2022." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3(4): 812–17. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/business/article/view/296>.
- Putri, Indah Aminah, and Eza Okhy Awalia Nasution. 2022. "Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8(1): 166. doi:10.30821/se.v8i1.13778.
- Rahmad Riho Zeen et al. 2022. "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia." *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 2(4): 259–69. doi:10.55606/cemerlang.v2i4.624.
- Rahmawati, Sinta, Fitri Juniwati Astuti, and Fitri Juniwati Ayuningtyas. 2023. "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Journal Of Creative Industry* 1(1): 225–33.
- Salim, Jul Fahmi. 2017. "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2000: 1–2010: 12." *E-Kombis* III(2): 68–76.
- Sari, Putri Keumala, and Fakhruddin. 2016. "Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 Dan 2008)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1(2): 1–23.
- Simanjuntak, Lestari, Lasrim Pardosi, and Mona Amanda Nababan. 2023. "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1(1): 225–33.
- Sukarna, Faisal, Sholikul Hadi, and Abdul Husenudin. 2024. "Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia Periode 2003-2009: Study Pemikiran M. Umerchakra." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(4): 4139–52. doi:10.47467/alkharaj.v6i4.888.
- Umi, Novia Turmina et al. 2022. "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Di Indonesia Dalam Pandangan Islam." *SALAM: Islamic Economics Journal* 3(2): 101–9.
- Yudi Setiawan, Rifky, and Karsinah Karsinah. 2018. "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Dalam Mempengaruhi Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Economics Development Analysis Journal* 5(4): 460–73. doi:10.15294/edaj.v5i4.22183.
- Yusri, Chairina, and Rifdah Riyan Dara. 2023. "Dampak Transmisi Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 11(1): 78–96. doi:10.21067/jrma.v11i1.8222.